

ABSTRAK

Kabupaten Blora mempunyai luas wilayah sebesar 182.059 Ha yang sebagian besar wilayahnya berupa hutan yaitu sebesar 49% dari seluruh wilayahnya, sehingga memiliki potensi keunggulan pada sumberdaya hutan jati yang melimpah sebagai salah satu modal dasar untuk dioptimalkan menjadi objek wisata. Keberadaan hutan jati yang dimiliki Kabupaten Blora apabila dimaksimalkan menjadi objek wisata akan memperoleh nilai ekonomi melalui dua keuntungan yaitu pemasukan retribusi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan kunjungan dari masyarakat luar daerah, kedua memiliki peluang untuk meningkatkan sektor lainnya yang bisa menguntungkan khususnya Kabupaten Blora, secara lebih luas untuk provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengembangan objek wisata hutan di Kabupaten Blora sehingga tetap memperhatikan fungsi hutan, untuk mengetahui penanggungjawab dalam pengembangan objek wisata hutan di Kabupaten Blora beserta program-programnya, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wisata hutan di Kabupaten Blora dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analisis. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk pengembangan objek wisata hutan secara terpadu di Kabupaten Blora dengan memanfaatkan jasa lingkungan yang ada, yaitu berupa yaitu Goa Terawang yang ada di kawasan KPH Blora, Loko Tour yang berada di kawasan KPH Cepu serta wisata hutan kota di KPH Randublatung. Adapun upaya pengembangan pelestarian hutan dilakukan dengan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Penanggungjawab dalam pengembangan objek wisata hutan di Kabupaten Blora adalah Perum Perhutani dalam hal ini adalah BKM-JLPL. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wisata hutan di Kabupaten Blora adalah kurang diminati pengunjung khususnya wisatawan lokal, anggaran pengelolaan yang terbatas sehingga sarana dan prasarana wisata banyak yang rusak akibat kurang terampilnya sumber daya manusia pengelola wisata, untuk mengatasi hal tersebut, melalui Perhutani dibentuk lembaga yang disebut Wana Wisata untuk, melakukan penataan ulang dan kebersihan lingkungan, serta melakukan pelatihan pelatihan terhadap pengelola wisata.

Kata kunci : objek wisata hutan, pelestarian lingkungan